



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.1
Telepon (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/TAHUN 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS,



KAMALIRASYID, S. STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001

Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Luwu Timur;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
4. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
6. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. *Arsip.*

Lampiran I:

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Lampiran II:

**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----------|---|--|
| 1 | Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur | Atasan PPID Pembantu |
| 2 | Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur | PPID Pembantu |
| 3 | Kasubag Perencanaan Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur | Sekretaris PPID Pembantu |
| 4 | Mediator Hubungan Industrial | Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial TK |
| 5 | Pengantar Kerja | Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan |
| 6 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi |
| 7 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi |

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 04 Januari 2024



KAMAL RASYID. S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

Lampiran III:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PEMBANTU
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----------|---|---------------------------------|---|
| 1 | MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi | Kasubag Perencanaan | Sekretaris |
| 2 | - NASRULLAH, SP, M.Si - NELY HARYATI BATARA, SE | Mediator Hubungan Industrial | Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial TK |
| 3 | - Moh. Arifin, SH.i - Seli Lantang, S.Kom | Pengantar Kerja | Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan |
| 4 | Erfina Aras, SE | Penggerak Swadaya Masyarakat | Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi |
| 5 | Arif, SE | Penggerak Swadaya Masyarakat | Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi |

Ditetapkan : di Malili
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat Pembina Utama Muda
N/P. 19810511 199912 1 001